



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 466 /2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu untuk menyusun Peta Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peta Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : 1. Hasil pertemuan pertama pelaksanaan Asistensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 pada Tanggal 12 sampai dengan 14 April 2022;

 2. Hasil pertemuan kedua pelaksanaan Asistensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 Tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peta Lintas Fungsi dan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
1. terjadi perubahan arah strategis Kabupaten Barito Selatan (visi, misi dan strategi) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Perangkat Daerah;
 2. adanya kebutuhan atau dorongan baik internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 4. adanya usulan dan inisiatif perubahan yang datang dari Perangkat Daerah; dan/atau
 5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 466 /2022

TANGGAL : 17 November 2022

**TENTANG : PETA PROSES BISNIS SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PETA PROSES BISNIS SPBE KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023-2026**

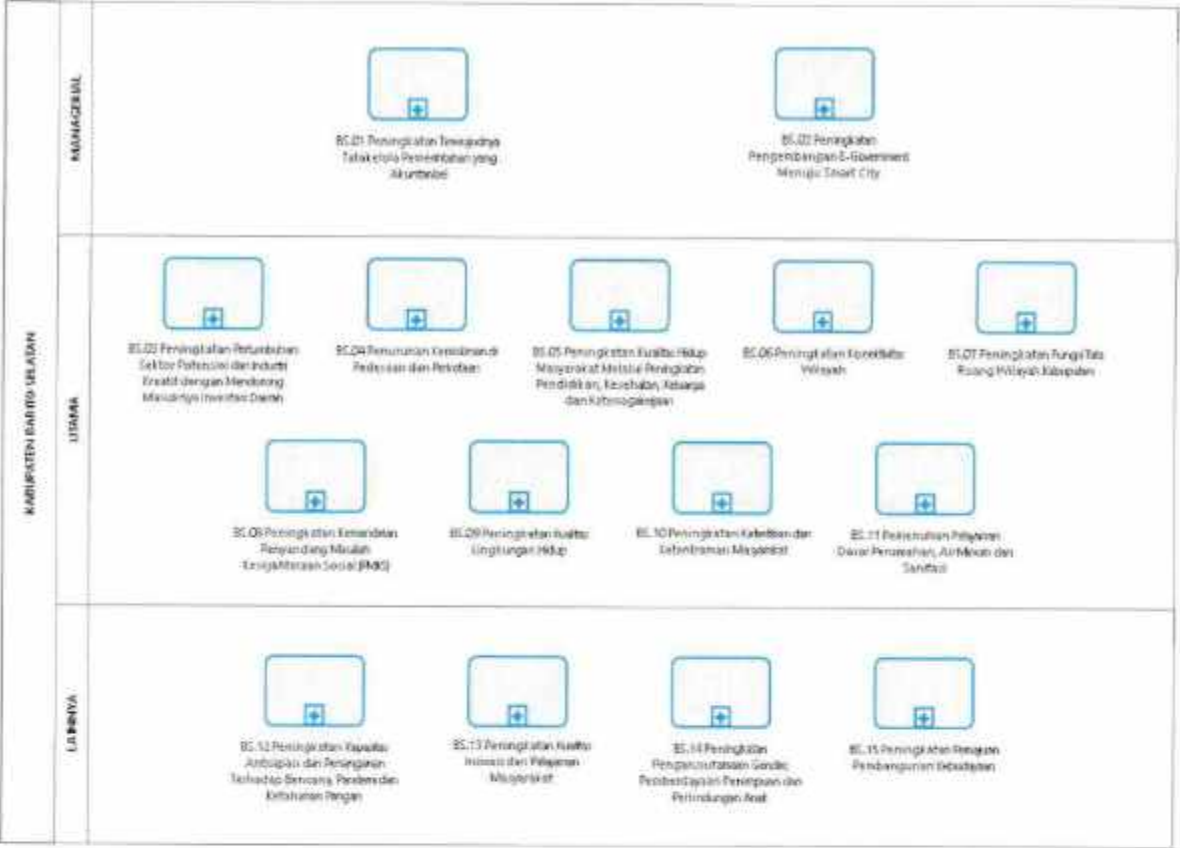
A. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah.
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Berdaya Saing.
3. Pengelolaan SDA dan LH serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Kerentanan Pangan.
4. Mewujudkan Good Governance Secara Menyeluruh.
5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Tujuan

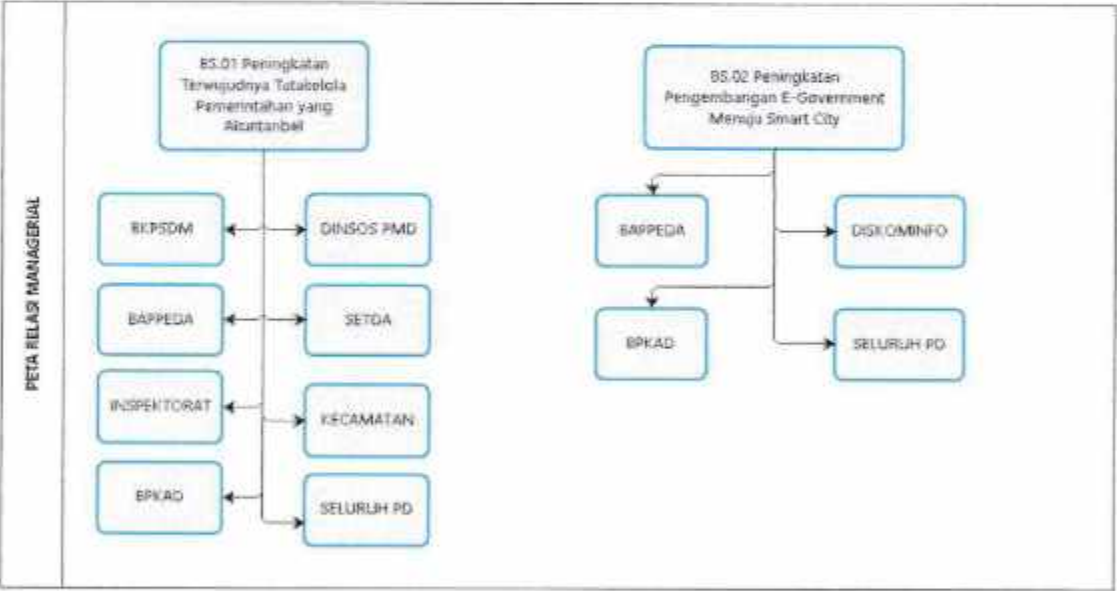
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
4. Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan.
5. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

C. Peta Proses Bisnis Kabupaten Barito Selatan

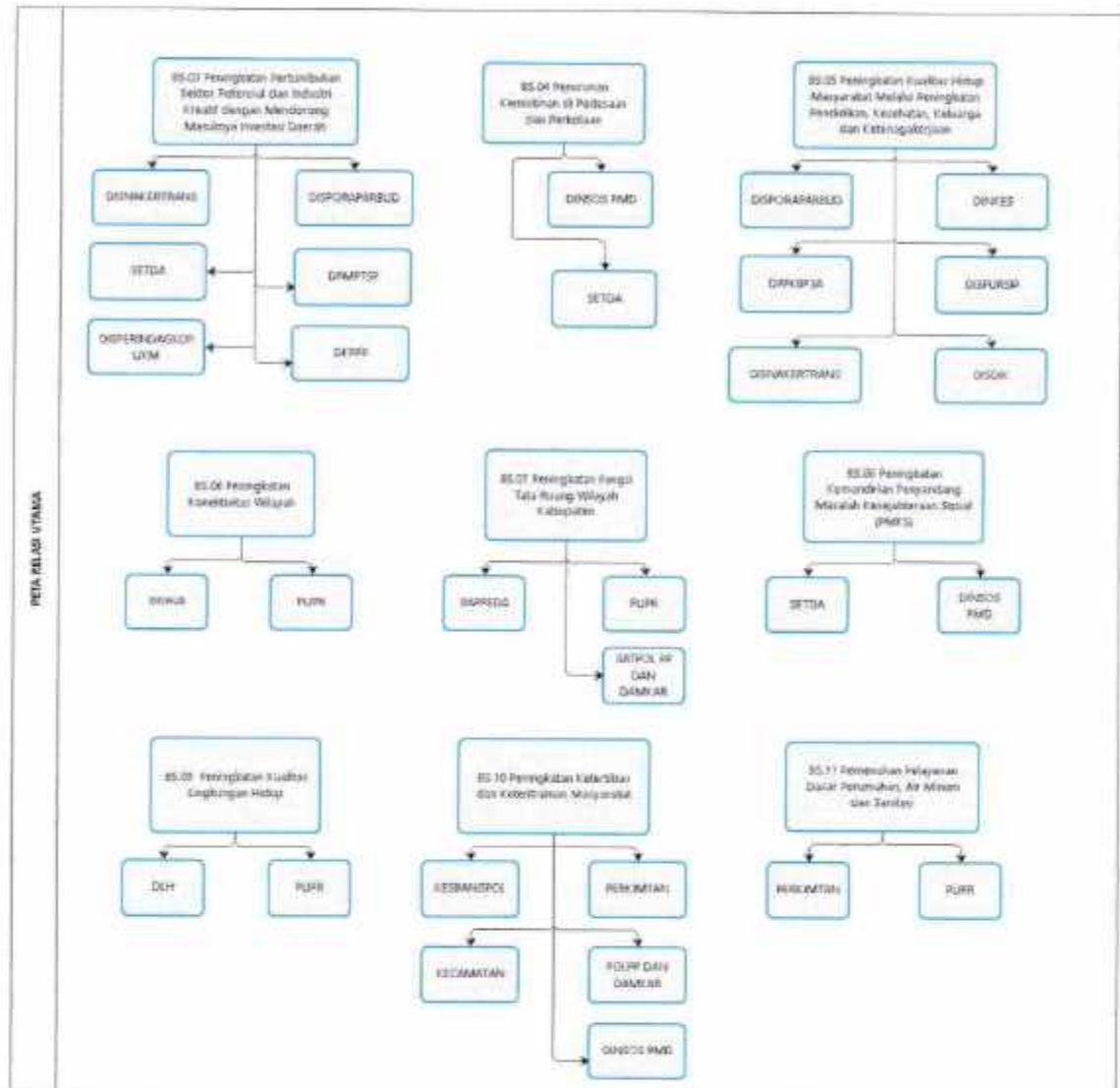


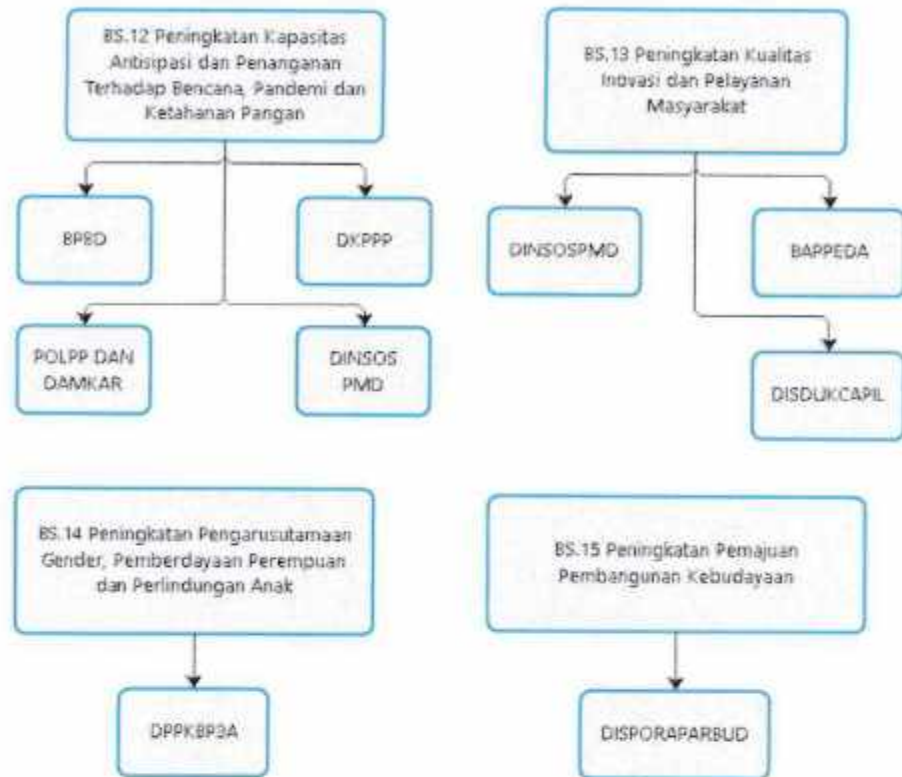
Peta Relasi Proses Bisnis Kabupaten Barito Selatan

1. Peta Relasi Managerial



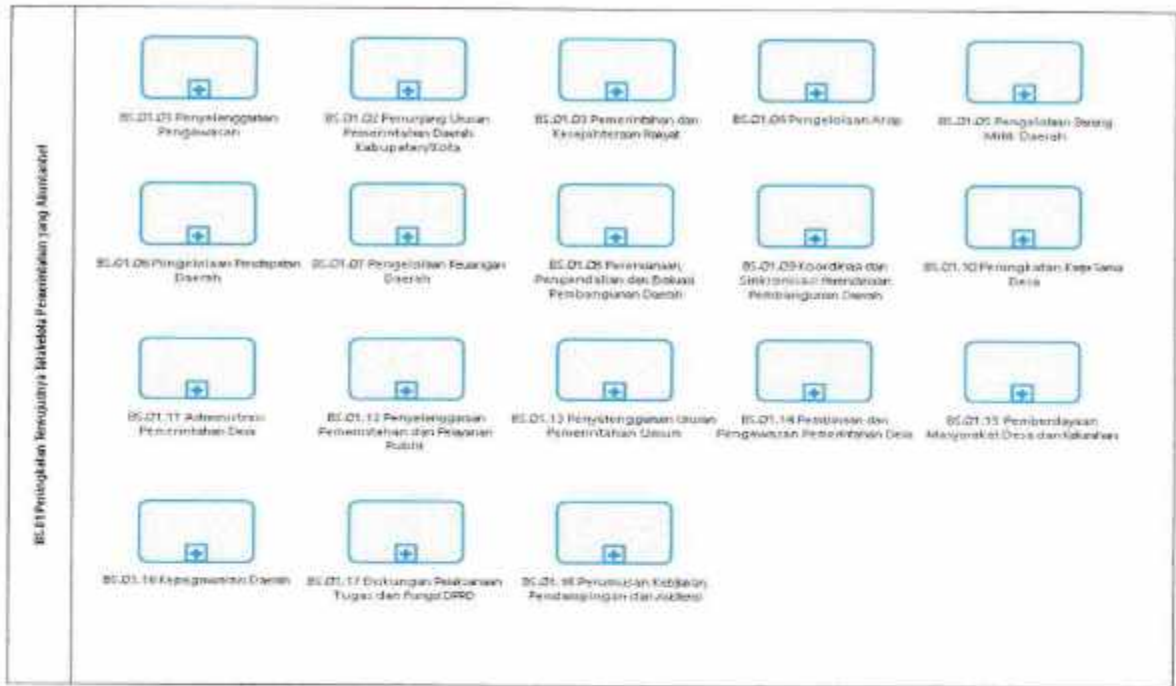
3. Peta Relasi Lainnya



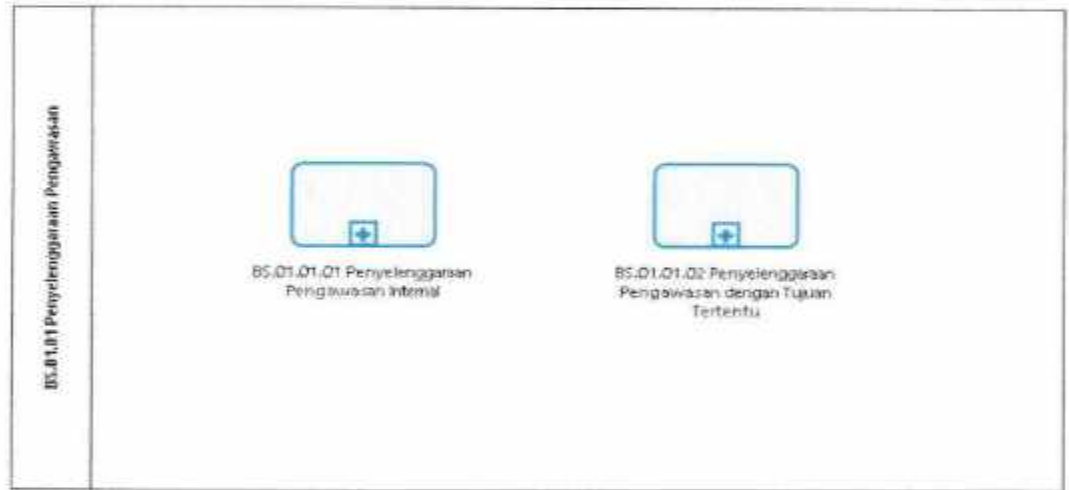


D. Peta Subproses

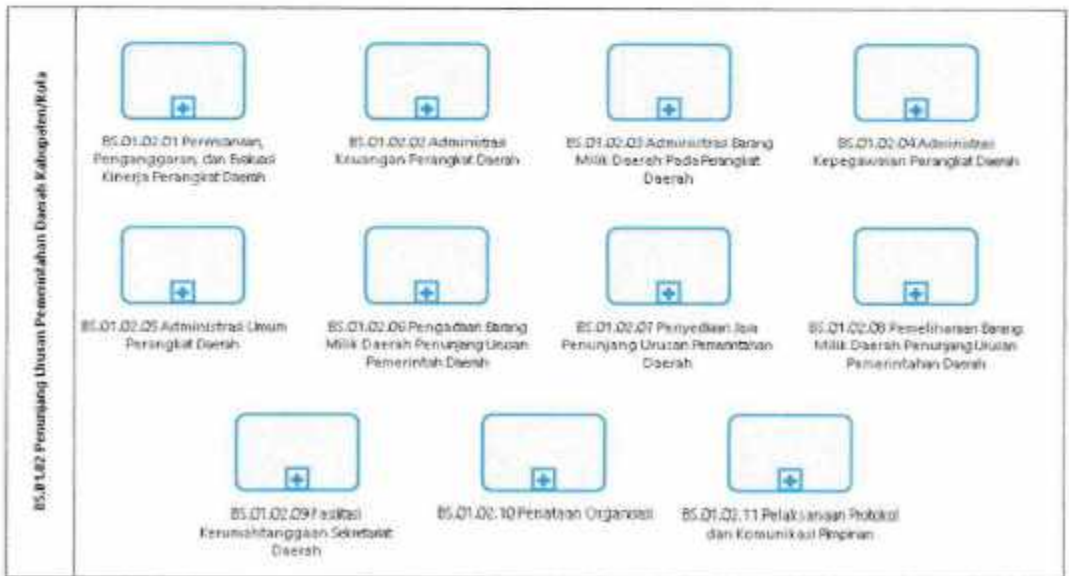
BS.01 Peningkatan Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntanbel



BS.01.01 Penyelenggaraan Pengawasan



BS.01.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



BS.01.03 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BS.01.03 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
			
	BS.01.03.01 Administrasi Tata Pemerintahan	BS.01.03.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	BS.01.03.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum

BS.01.04 Pengelolaan Arsip

BS.01.04 Pengelolaan Arsip			
			
	BS.01.04.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	BS.01.04.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	BS.01.04.03 Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

BS.01.05 Pengelolaan Barang Milik Daerah

BS.01.05 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
			
	BS.01.05.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		

BS.01.06 Pengelolaan Pendapatan Daerah



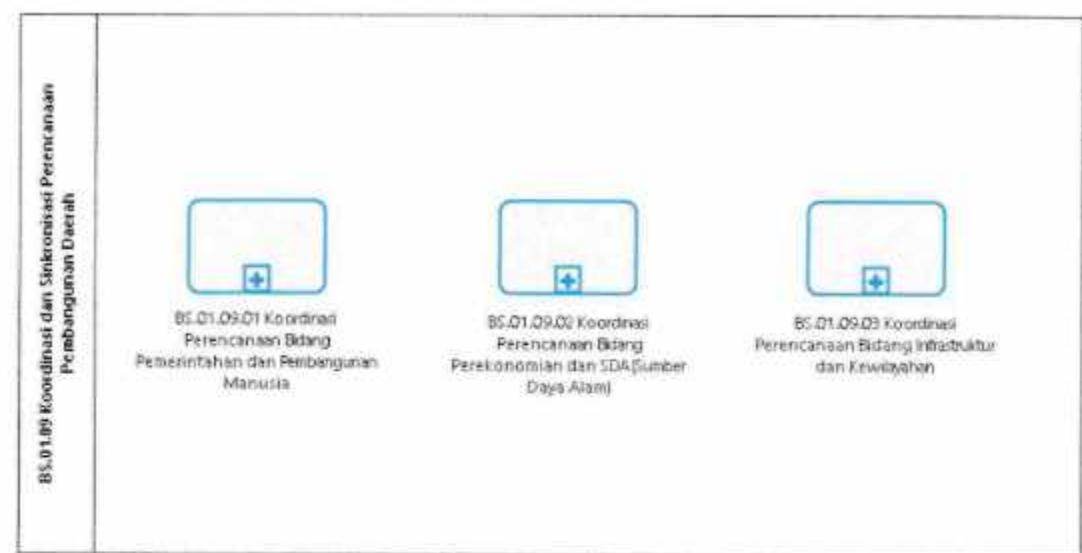
BS.01.07 Pengelolaan Keuangan Daerah



BS.01.08 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



BS.01.09 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah





BS.01.10 Peningkatan Kerja Sama Desa



BS.01.11 Administrasi Pemerintahan Desa

BS.01.11 Administrasi Pemerintahan Desa	 <p data-bbox="755 559 1079 642">BS.01.11.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p>
---	--

BS.01.12 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BS.01.12 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<div data-bbox="641 1121 803 1229">  <p data-bbox="584 1247 860 1348">BS.01.12.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> </div> <div data-bbox="1023 1121 1185 1229">  <p data-bbox="966 1247 1242 1323">BS.01.12.02 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat</p> </div>
--	---

BS.01.13 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BS.01.13 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	 <p data-bbox="738 1985 1071 2068">BS.01.013.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>
---	---

BS.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BS.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	 <p>BS.01.14.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>
---	---

BS.01.15 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

BS.01.15 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	 <p>BS.01.15.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p>  <p>BS.01.15.02 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>  <p>BS.15.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>
---	--

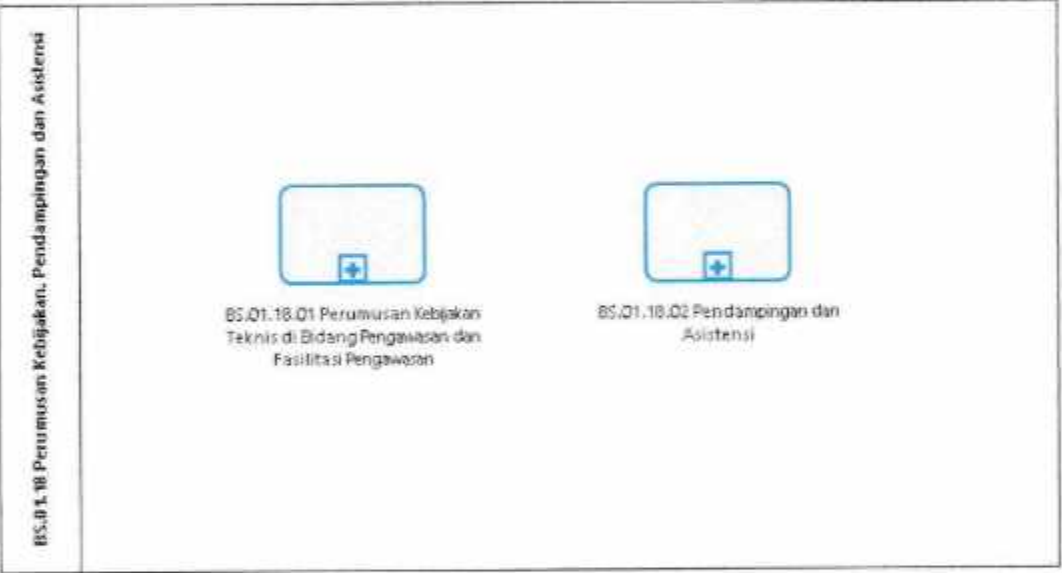
BS.01.16 Kepegawaian Daerah

BS.01.16 Kepegawaian Daerah	 <p>BS.01.16.01 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p>  <p>BS.01.16.02 Mutasi dan Promosi ASN</p>  <p>BS.01.16.03 Pengembangan Kompetensi ASN</p>  <p>BS.01.16.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p>
-----------------------------	--

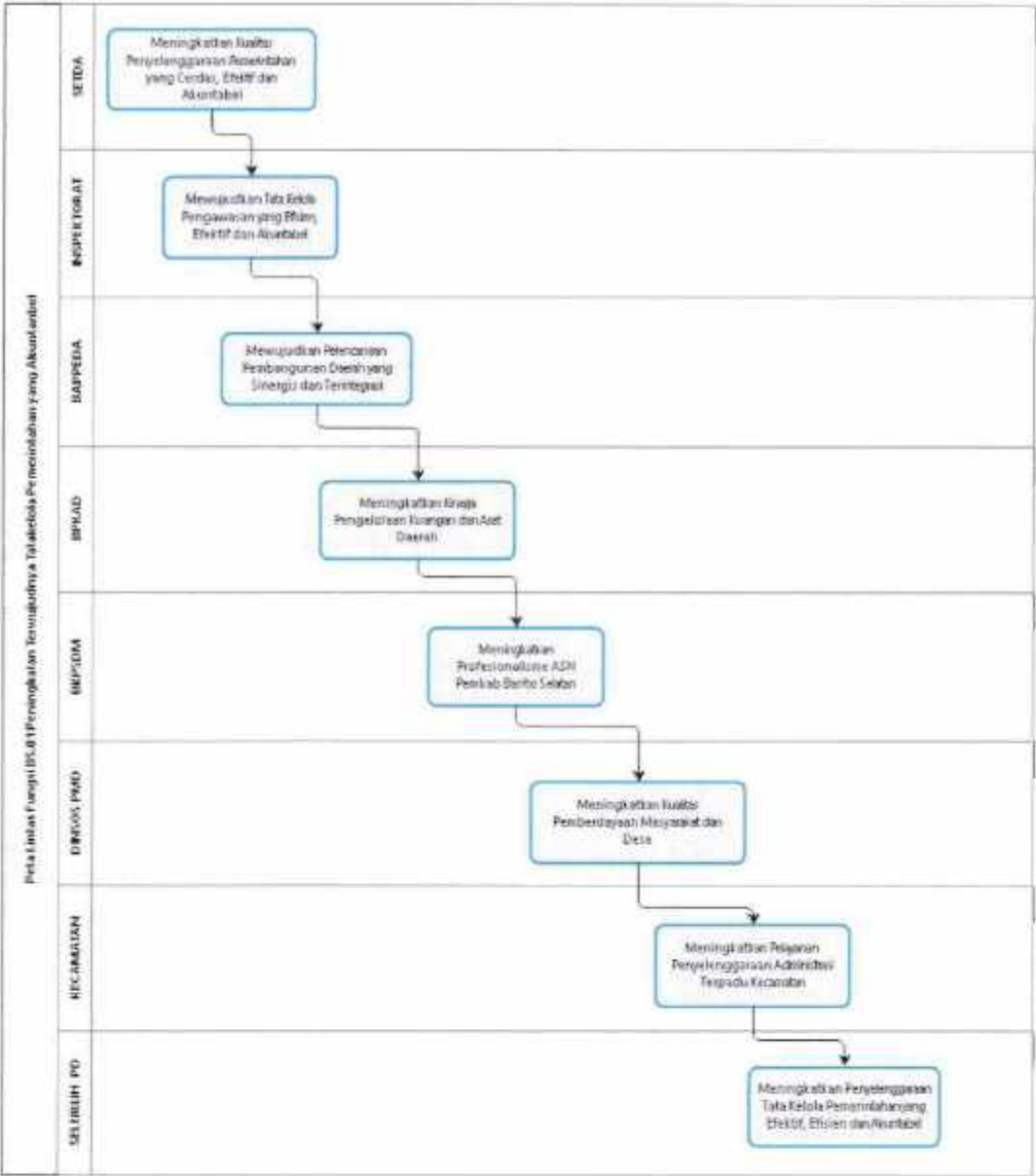
BS.01.17 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD



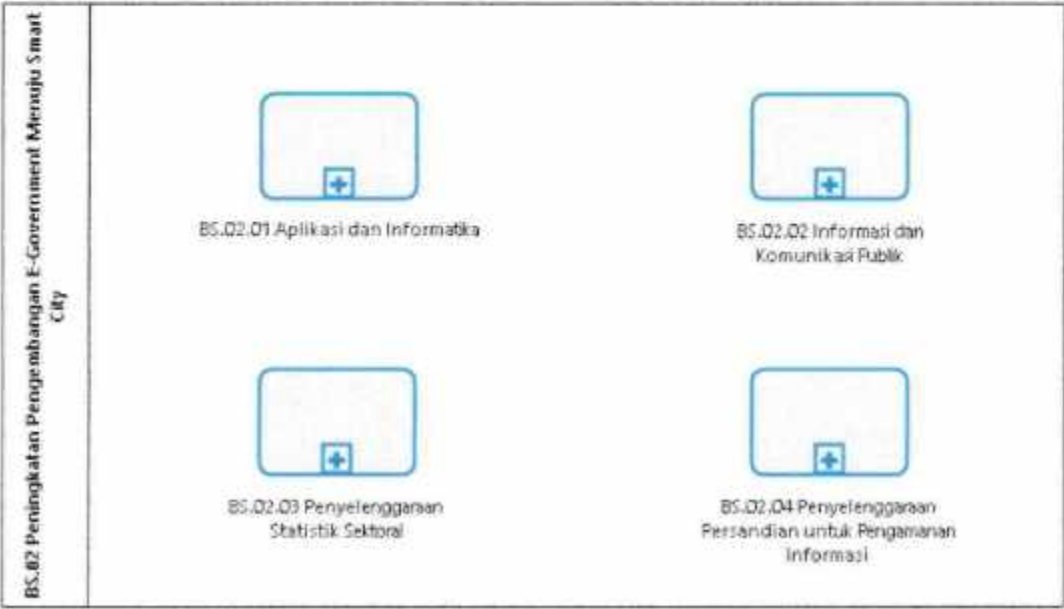
BS.01.18 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi




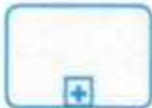
Peta Lintas Fungsi BS.01



BS.02 Peningkatan Pengembangan E-Government Menuju Smart City



BS.02.01 Aplikasi dan Informatika

BS.02.01 Aplikasi dan informatika	<div><div></div><div>BS.02.01.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</div></div> <div><div></div><div>BS.02.01.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div></div>
-----------------------------------	---

BS.02.02 Informasi dan Komunikasi Publik

BS.02.02 Informasi dan Komunikasi publik	<div><div></div><div>BS.02.02.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</div></div>
--	--

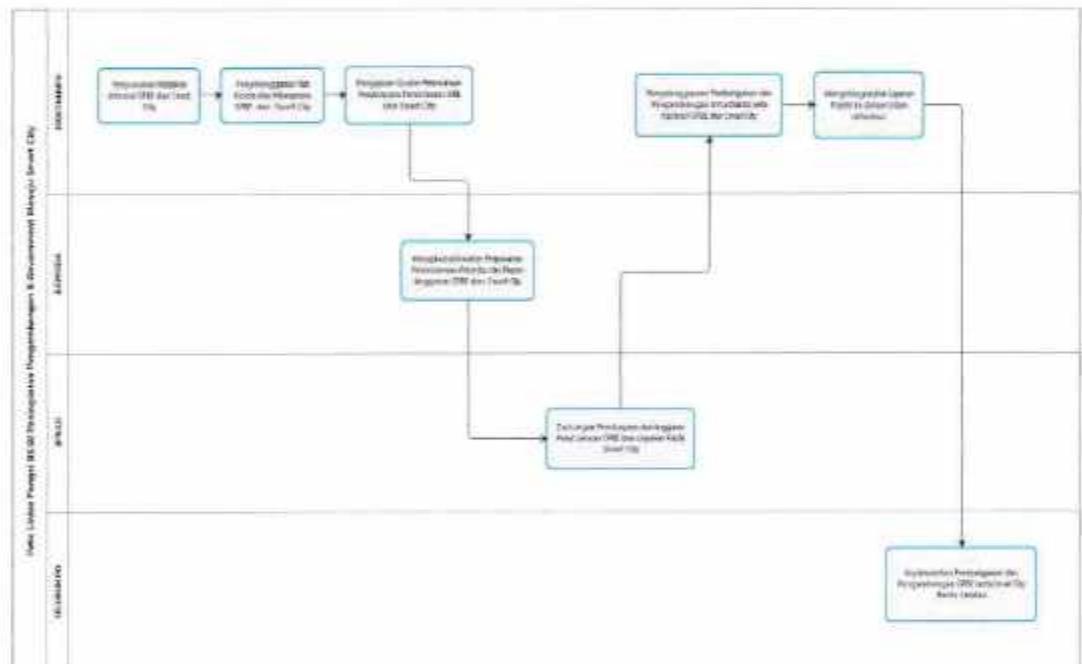
BS.02.03 Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BS.02.03 Penyelenggaraan Statistik sektoral	<div><div></div><div>BS.02.03.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</div></div>
---	---




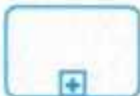




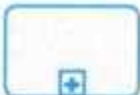


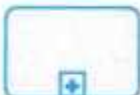




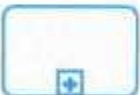

BS.02.04 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi



Peta Lintas Fungsi BS.02



BS.03 Peningkatan Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah

BS.03 Peningkatan Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendukung Masuknya Investasi Daerah				
	BS.03.01 Pembangunan Kawasan Transmigrasi	BS.03.02 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	BS.03.03 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	BS.03.04 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
				
	BS.03.05 Pengendalian dan Usaha Industri Kabupaten/Kota	BS.03.06 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	BS.03.07 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	BS.03.08 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
				
	BS.03.09 Pemasaran Pariwisata	BS.03.10 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	BS.03.11 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	BS.03.12 Pengembangan dan Penanaman Modal
				
	BS.03.13 Pelayanan Penanaman Modal	BS.03.14 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	BS.03.15 Perizinan Usaha Pertanian	BS.03.16 Penyuluhan Pertanian
				
	BS.03.17 Pengelolaan Perikanan Budidaya	BS.03.18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		

BS.03.01 Pembangunan Kawasan Transmigrasi

BS.03.01 Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<div>  </div> <div> BS.03.01.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota </div>
---	---

BS.03.02 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

BS.03.02 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<div data-bbox="820 365 966 478" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="776 491 1010 567" data-label="Text"> <p>BS.03.02.01 Pengembangan Satuan permukiman pada Tahap Kemandirian</p> </div>
--	--

BS.03.03 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

BS.03.03 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<div data-bbox="609 1121 755 1234" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="565 1247 799 1323" data-label="Text"> <p>BS.03.03.01, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> </div> <div data-bbox="1015 1121 1161 1234" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="971 1247 1205 1348" data-label="Text"> <p>BS.03.03.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja</p> </div>
--	--

BS.03.04 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

BS.03.04 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	<div data-bbox="828 1852 974 1965" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="784 1978 1034 2053" data-label="Text"> <p>BS.03.04.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tert, Tert Utang, dan Pengawasan</p> </div>
---	---

BS.03.05 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

BS.03.05 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	 <p>BS.03.05.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah</p>
--	---

BS.03.06 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

BS.03.06 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	 <p>BS.03.06.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Melayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
---	--

BS.03.07 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

BS.03.07 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	 <p>BS.03.07.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
---	---

BS.03.08 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha


Mikro (UMKM)

BS.03.08 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<div></div> <div>BS.03.08.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku</div>
--	--

BS.03.09 Pemasaran Pariwisata

BS.03.09 Pemasaran Pariwisata	<div></div> <div>BS.03.09.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</div>
-------------------------------	---


BS.03.10 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

BS.03.10 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<div></div> <div>BS.03.10.01 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</div>
---	---

BS.03.11 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BS.03.11 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<div><p>BS.03.11.Q1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p></div>
--	---






BS.03.12 Pengembangan Iklim Penanaman Modal

BS.03.12 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<div><div><p>BS.03.12.Q1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p></div><div><p>BS.03.12.Q2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota</p></div></div>
---	--

BS.03.13 Pelayanan Penanaman Modal

BS.03.13 Pelayanan Penanaman Modal	 <p>BS.03.13.01 Pelayanan Perizinan dan perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>
------------------------------------	---

BS.03.14 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

BS.03.14 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	 <p>BS.03.14.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p>	 <p>BS.03.14.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewani, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	 <p>BS.03.14.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Ternak Ikan</p>
	 <p>BS.03.14.04 Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	 <p>BS.03.14.05 Pembangunan Prasarana Pertanian</p>	 <p>BS.03.14.06 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</p>

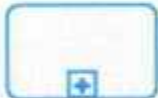

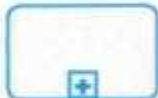

BS.03.15 Perizinan Usaha Pertanian

BS.03.15 Perizinan Usaha Pertanian	 <p>BS.03.15.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
------------------------------------	--





BS.03.16 Penyuluhan Pertanian

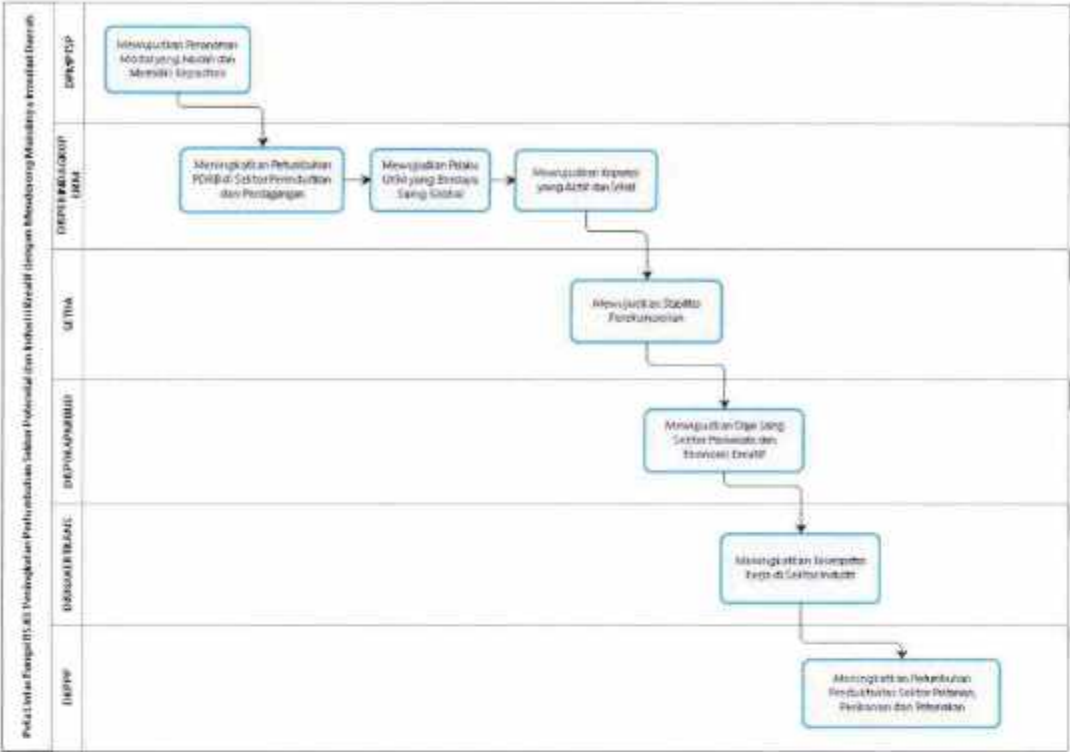
BS.03.16 Penyuluhan Pertanian	<div><p>BS.03.16.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p></div>
-------------------------------	---

BS.03.17 Pengelolaan Perikanan Budidaya

BS.03.18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<div><p>BS.03.18.01 Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Budidaya</p></div>	<div><p>BS.03.18.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kedi</p></div>
	<div><p>BS.03.18.03 Penerbitan Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kedi</p></div>	<div><p>BS.03.18.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p></div>

BS.03.18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

BS.03.18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<div><p>BS.03.18.01 Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Budidaya</p></div>	<div><p>BS.03.18.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kedi</p></div>
	<div><p>BS.03.18.03 Penerbitan Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kedi</p></div>	<div><p>BS.03.18.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p></div>



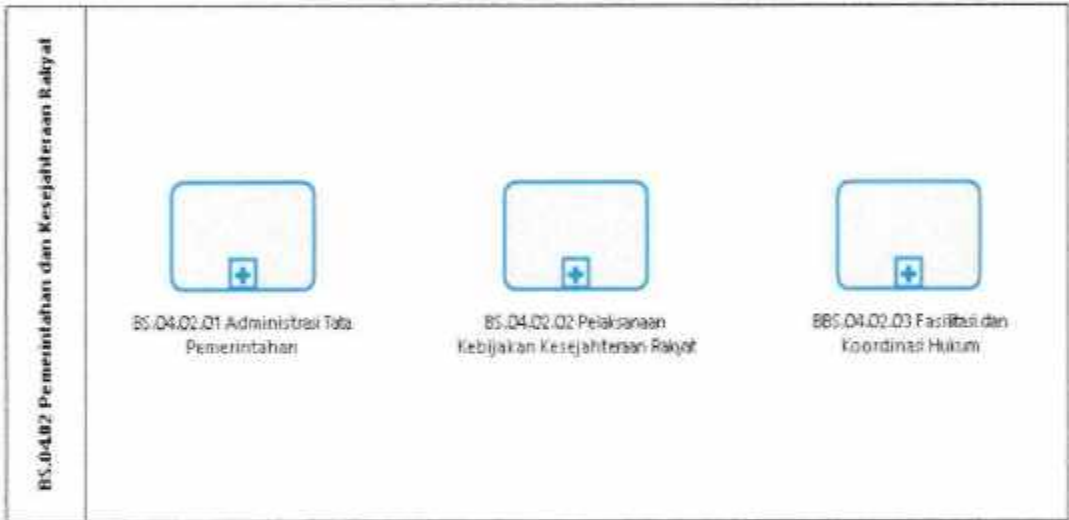
BS.04 Penurunan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan



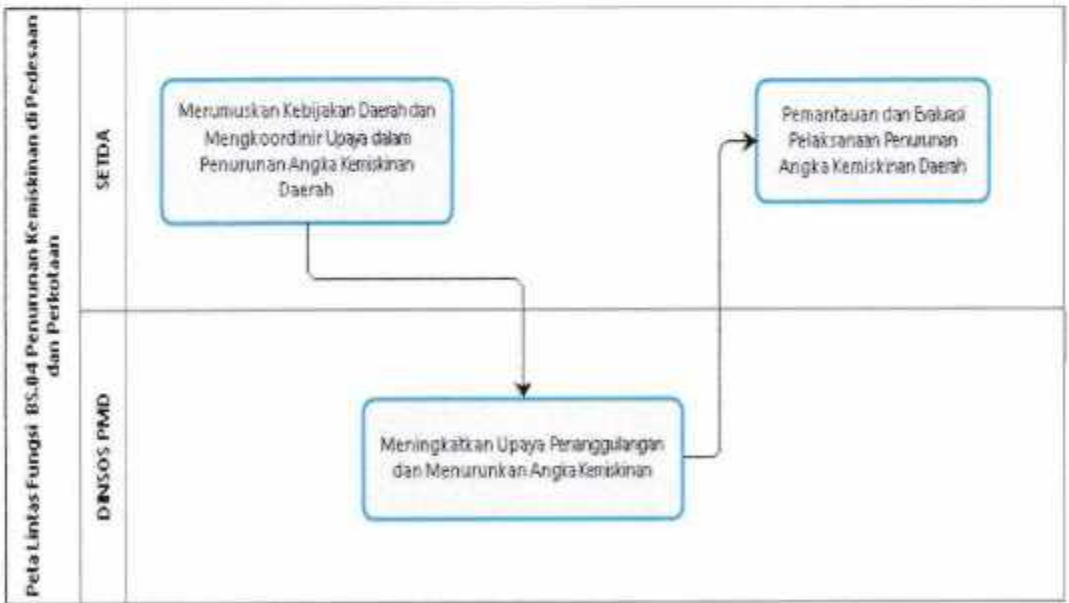
BS.04.01 Penataan Desa




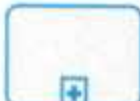
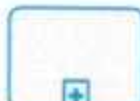









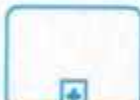

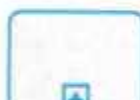
BS.04.02 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat






Peta Lintas Fungsi BS.04




BS.05 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga dan Ketenagakerjaan

BS.05 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga dan Ketenagakerjaan				
	BS.05.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	BS.05.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	BS.05.03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	BS.05.04 Pengendalian Penduduk
				
	BS.05.05 Perencanaan Tenaga Kerja	BS.05.06 Penempatan Tenaga Kerja	BS.05.07 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	BS.05.08 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				
	BS.05.09 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	BS.05.10 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	BS.05.11 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	BS.05.12 Pembinaan Perpustakaan
				
	BS.05.13 Pengelolaan Pendidikan	BS.05.14 Pengembangan Kurikulum	BS.05.15 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

BS.05.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

BS.05.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
	BS.05.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BS.05.01.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BS.05.01.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi



BS.05.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

BS.05.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
	BS.05.02.01 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kondisi lokal	BS.05.02.02 Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
		
	BS.05.02.03 Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	BS.05.02.04 pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB

BS.05.03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

BS.05.03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
	BS.05.03.01 Pelaksanaan	
	Pembangunan keluarga melalui	
	pembinaan ketahanan dan	
	kesejahteraan keluarga	
		
	BS.05.03.01 Pelaksanaan dan	
	peningkatan peran serta	
	organisasi kemasyarakatan	
	tingkat daerah kabupaten/kota	
	dalam pembangunan keluarga	
	melalui pembinaan ketahanan	
	

BS.05.04 Pengendalian Penduduk

BS.05.04 Pengendalian Penduduk		
	BS.05.04.01 Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	
	BS.05.04.02 Pemetaan Perlakuan Pengendalian penduduk di kawasan daerah Kabupaten/kota	




BS.05.05 Perencanaan Tenaga Kerja

BS.05.05 Perencanaan Tenaga Kerja	<div><p>BS.05.05.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</p></div>
-----------------------------------	---




BS.05.06 Penempatan Tenaga Kerja

BS.05.06 Penempatan Tenaga Kerja	<div><div><p>BS.05.06.01 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p></div><div><p>BS.05.06.02 Penetapan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota</p></div></div>
----------------------------------	--

BS.05.07 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

BS.05.07 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	<div><div><p>BS.05.07.01 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</p></div><div><p>BS.05.07.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p></div><div><p>BS.05.07.03 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div></div>
---	--




BS.05.08 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

BS.05.08 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<div>  <p>BS.05.08.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> </div> <div>  <p>BS.05.08.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> </div> <div>  <p>BS.05.08.03 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> </div>
--	---




BS.05.09 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

BS.05.09 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	<div>  <p>BS.05.09.01 Penentuan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> </div>
--	--



BS.05.10 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

BS.05.10 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<div>  <p>BS.05.10.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> </div> <div>  <p>BS.05.10.02 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri</p> </div> <div>  <p>BS.05.10.03 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p> </div>
--	--





BS.05.11 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

BS.05.11 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<div><p>BS.05.11.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitsan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div> <div><p>BS.05.11.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div> <div><p>BS.05.11.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div>
---	--

BS.05.12 Pembinaan Perpustakaan

BS.05.12 Pembinaan Perpustakaan	<div><p>BS.05.12.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div> <div><p>BS.05.12.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p></div>
---------------------------------	--


BS.05.13 Pengelolaan Pendidikan

BS.05.13 Pengelolaan Pendidikan	<div><p>BS.05.13.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p></div> <div><p>BS.05.13.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p></div> <div><p>BS.05.13.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p></div> <div><p>BS.05.13.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kelembaan</p></div>
---------------------------------	---

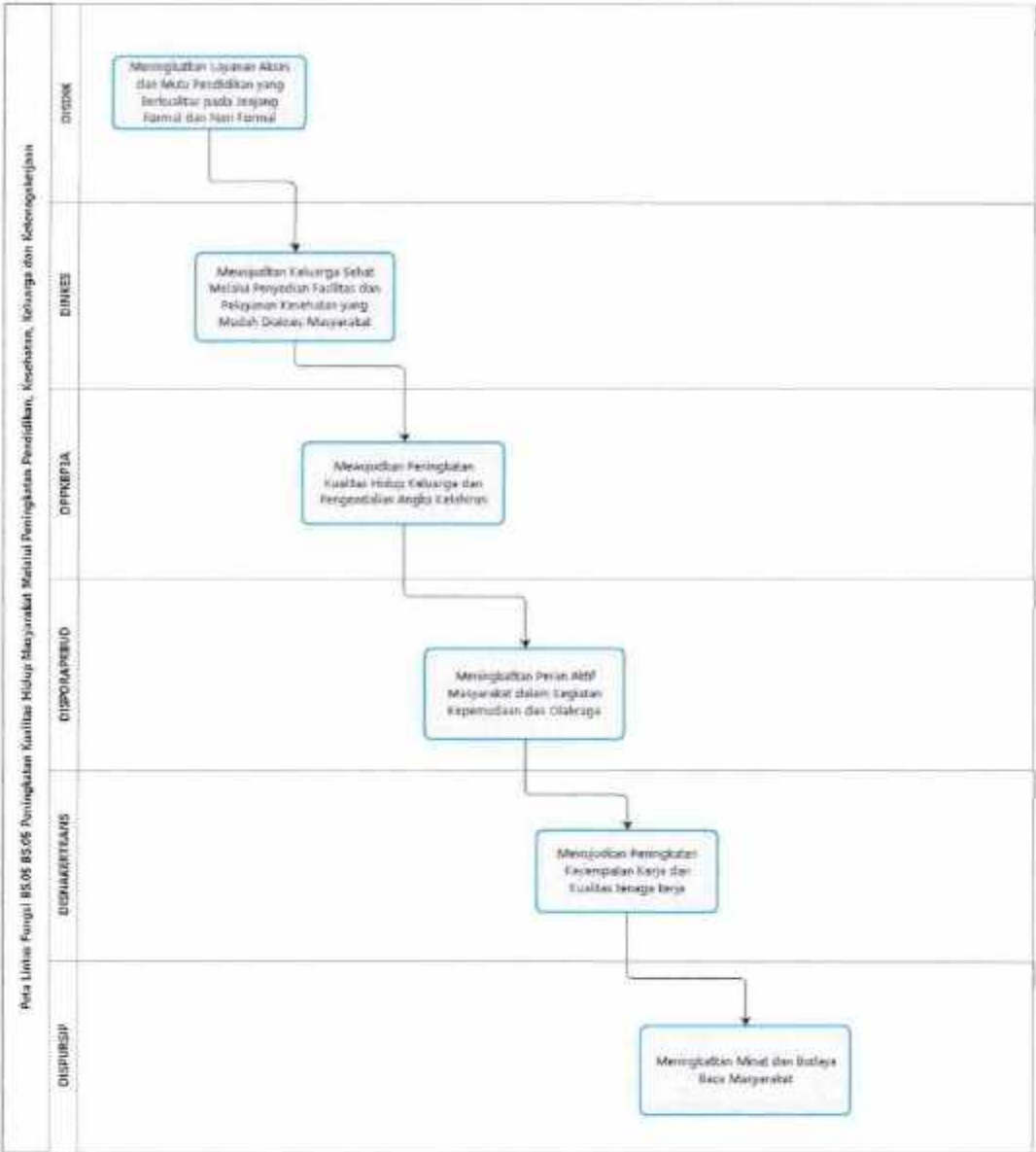
BS.05.14 Pengembangan Kurikulum

BS.05.14 Pengembangan Kurikulum	<div></div> <div>BS.05.14.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Non Formal</div>
---------------------------------	--

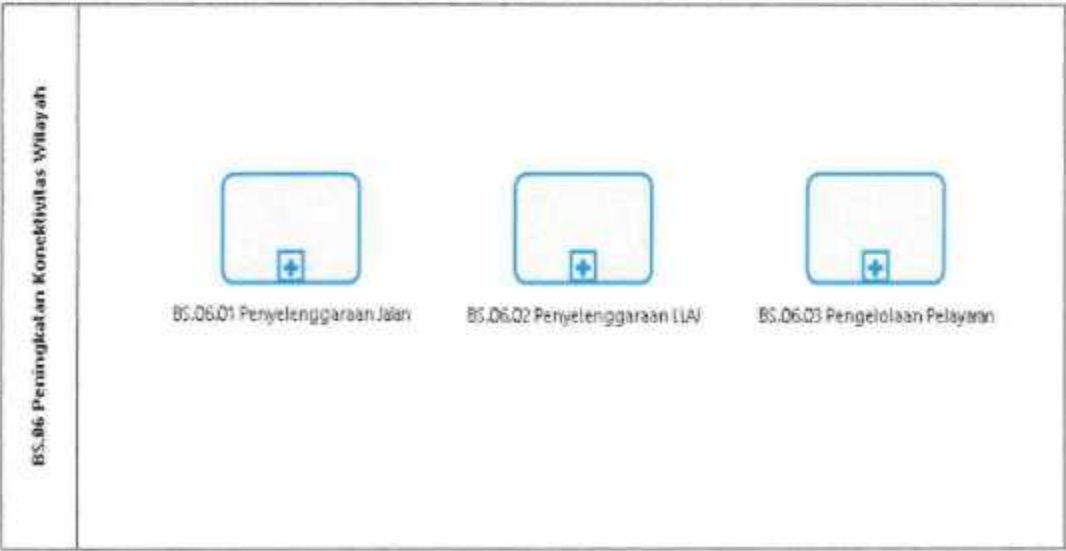
BS.05.15 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

BS.05.15 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<div></div> <div>BS.05.15.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</div>
---	---

Peta Lintas Fungsi BS.05





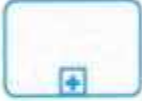


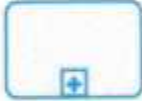
BS.06 Peningkatan Konektivitas Wilayah






BS.06.01 Penyelenggaraan Jalan

BS.06.01 Penyelenggaraan Jalan	<div></div> <p>BS.06.01.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p>
--------------------------------	---

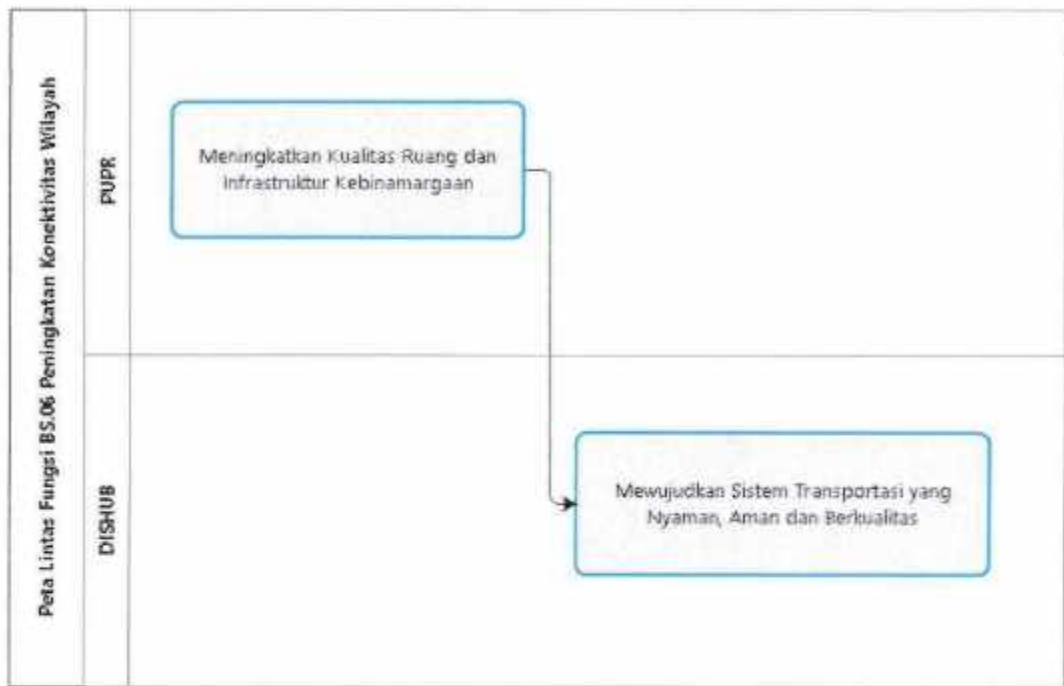
BS.06.02 Penyelenggaraan LLAJ

BS.06.02 Penyelenggaraan LLAJ	<div></div> <p>BS.06.02.01 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <div></div> <p>BS.06.02.02 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Jalan</p> <div></div> <p>BS.06.02.03 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
	<div></div> <p>BS.06.02.04 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <div></div> <p>BS.06.02.05 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <div></div> <p>BS.06.02.06 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>

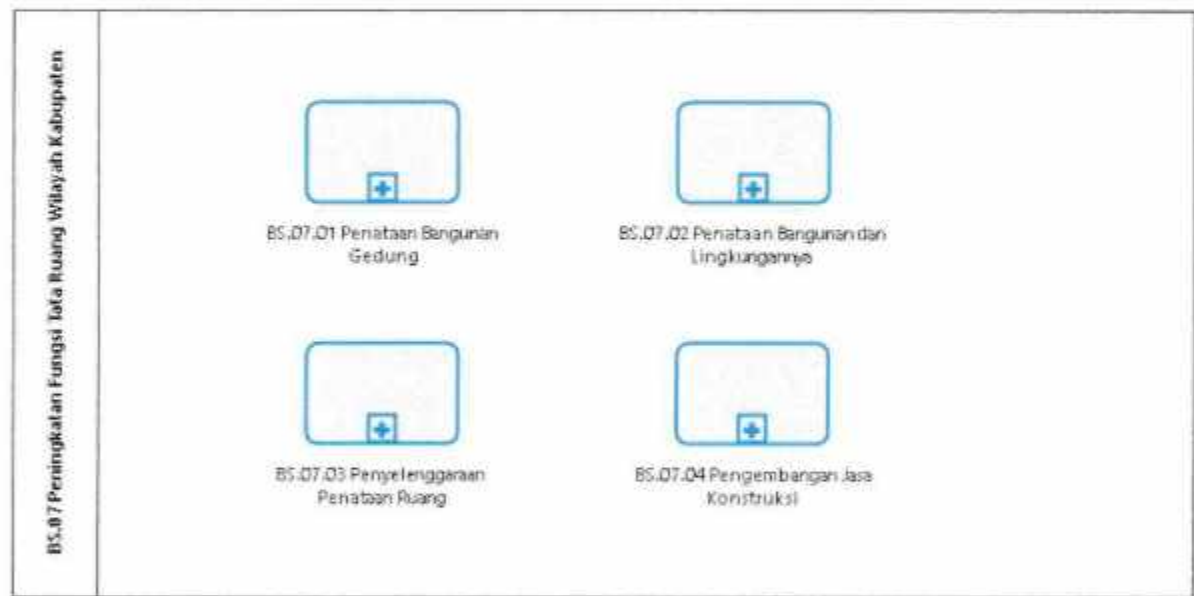
BS.06.03 Pengelolaan Pelayaran

BS.06.03 Pengelolaan Pelayaran	<div></div> <p>BS.06.03.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <div></div> <p>BS.06.03.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah</p> <div></div> <p>BS.06.03.03 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</p>
--------------------------------	---

Peta Lintas Fungsi BS.06



BS.07 Peningkatan Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten



BS.07.01 Penataan Bangunan Gedung

BS.07.01 Penataan Bangunan Gedung	 <p>BS.07.01.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung</p>
-----------------------------------	---


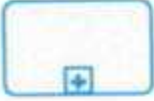

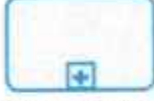
BS.07.02 Penataan Bangunan dan Lingkungannya

BS.07.02 Penataan Bangunan dan Lingkungannya	 <p>BS.07.02.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--

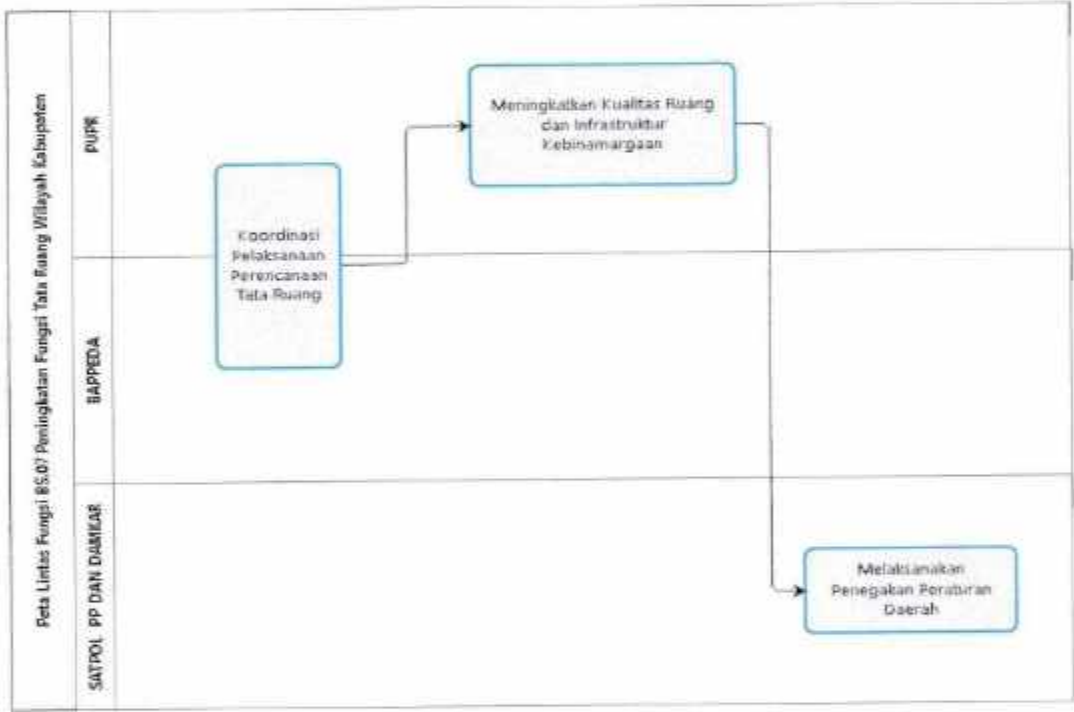
BS.07.03 Penyelenggaraan Penataan Ruang

BS.07.03 Penyelenggaraan Penataan Ruang	 <p>BS.07.03.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota</p>	 <p>BS.07.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p>
	 <p>BS.07.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p>	 <p>BS.07.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p>


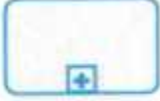

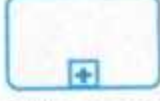
BS.07.04 Pengembangan Jasa Konstruksi

BS.07.04 Pengembangan Jasa Konstruksi		BS.07.04.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		BS.07.04.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		BS.07.04.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
		BS.07.04.04 Pemantuan dan Evaluasi IURK Nasional yang telah Diterbitkan

Peta Lintas Fungsi BS.07



BS.08 Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

BS.08 Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		BS.08.01 Pemberdayaan Sosial
		BS.08.02 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		BS.08.03 Rehabilitasi Sosial
		BS.08.04 Perlindungan dan Jaminan Sosial



BS.08.01 Pemberdayaan Sosial

BS.08.01 Pemberdayaan Sosial	<div><div></div><div>BS.08.01.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</div></div> <div><div></div><div>BS.08.01.02 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</div></div>
------------------------------	---

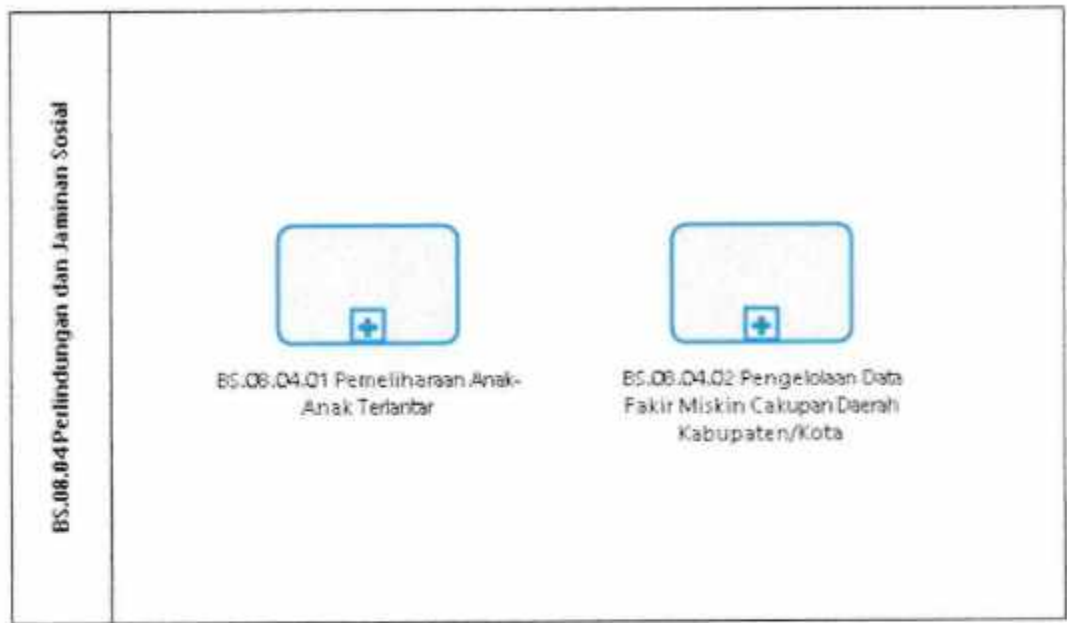
BS.08.02 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

BS.08.02 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<div><div></div><div>BS.08.02.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</div></div>
---	--

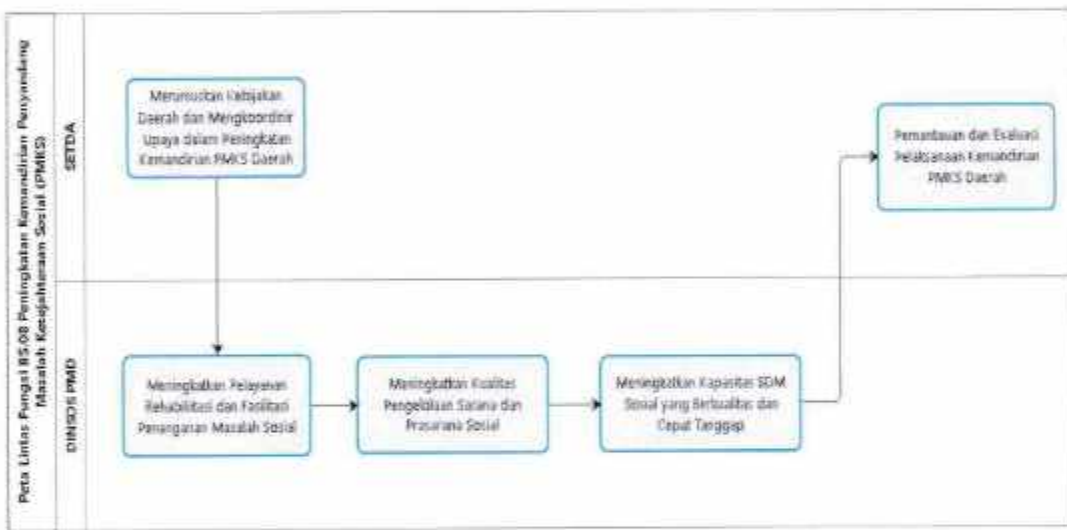
BS.08.03 Rehabilitasi Sosial

BS.08.03 Rehabilitasi Sosial	<div><div></div><div>BS.08.03.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</div></div> <div><div></div><div>BS.08.03.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</div></div>
------------------------------	--

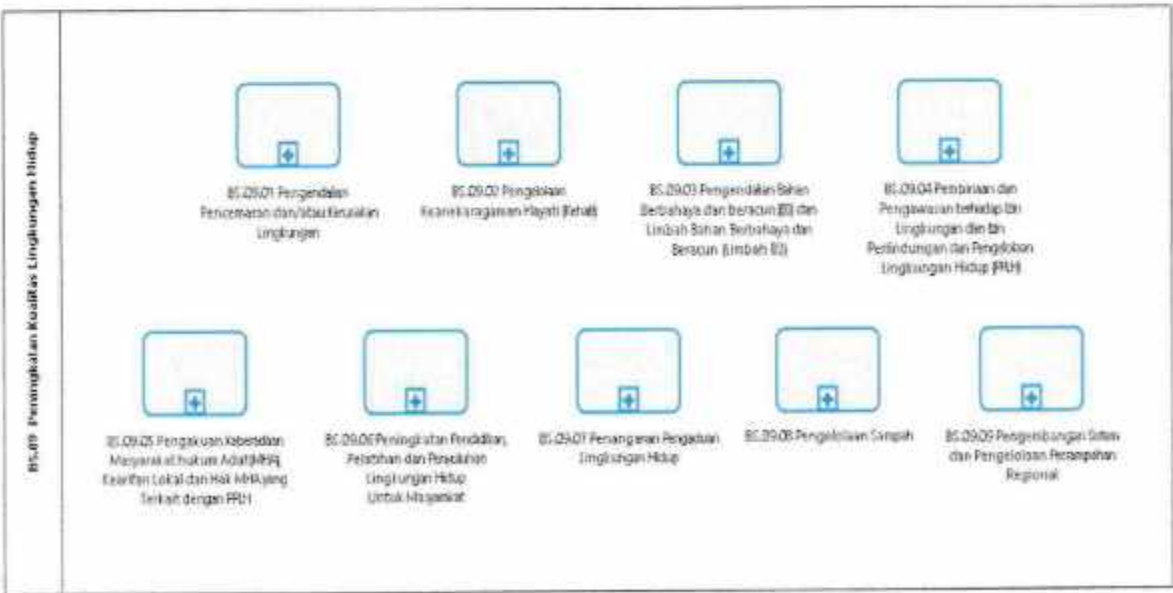
BS.08.04 Perlindungan dan Jaminan Sosial



Peta Lintas Fungsi BS.08



BS.09 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup




BS.09.01 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

BS.09.01 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	<div data-bbox="532 372 673 481"></div> <div data-bbox="485 493 724 567"> BS.09.01.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup Kabupaten/kota </div> <div data-bbox="854 372 995 481"></div> <div data-bbox="807 493 1045 589"> BS.09.01.02 Perenggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota </div> <div data-bbox="1170 372 1312 481"></div> <div data-bbox="1123 493 1362 589"> BS.09.01.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota </div>
--	---

BS.09.02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BS.09.02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	<div data-bbox="768 1204 1034 1345"></div> <div data-bbox="771 1363 1027 1446"> BS.09.02.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota </div>
---	---



BS.09.03 Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

BS.09.03 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	 <p>BS.09.03.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>
---	--

BS.09.04 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

BS.09.04 Pembinaan dan Pengawasan terhadap bin Lingkungan dan bin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	 <p>BS.09.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bin lingkungan dan bin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	---

BS.09.05 Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

BS.09.05 Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	<div>  <p>BS.09.05.01 pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> </div> <div>  <p>BS.09.05.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> </div>
--	---

BS.09.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan


Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

BS.09.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<div></div> <div>BS.09.06.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</div>
---	---

BS.09.07 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

BS.09.07 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<div></div> <div>BS.09.07.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</div>
--	--

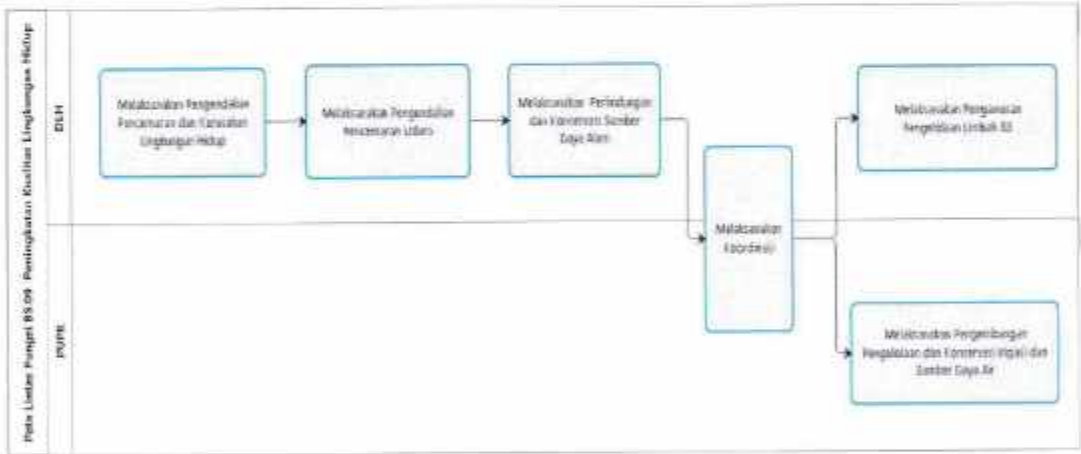
BS.09.08 Pengelolaan Sampah

BS.09.08 Pengelolaan Sampah	<div></div> <div>BS.09.08.01 Pengelolaan Sampah</div>
-----------------------------	---

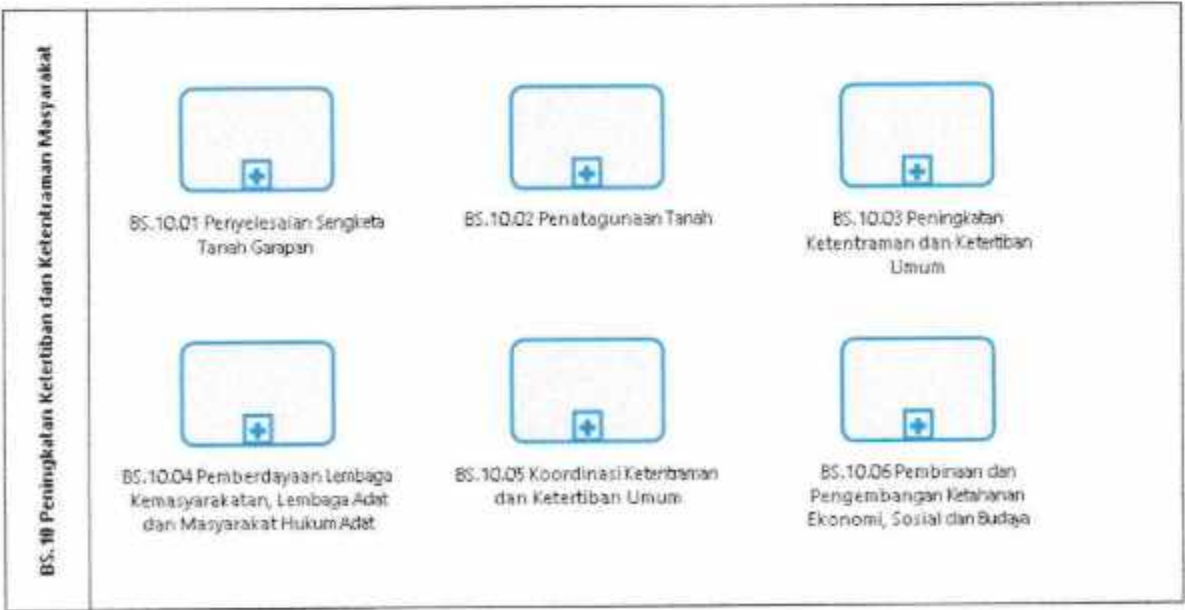
BS.09.09 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional



Peta Lintas Fungsi BS.09



BS.10 Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat



BS.10.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

BS. 10.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<div><p>BS.10.01.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p></div>
---	--

BS.10.02 Penatagunaan Tanah

BS. 10.02 Penatagunaan Tanah	<div><p>BS.10.02.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</p></div>
------------------------------	--

BS.10.03 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

BS. 10.03 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<div><div><p>BS.10.03.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p></div><div><p>BS.10.03.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p></div></div>
---	---

BS.10.04 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BS.10.04Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<div><p>BS.10.04.01 Pembendaysan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pembendaysan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Dserah Kabupaten/Kota</p></div>
---	--

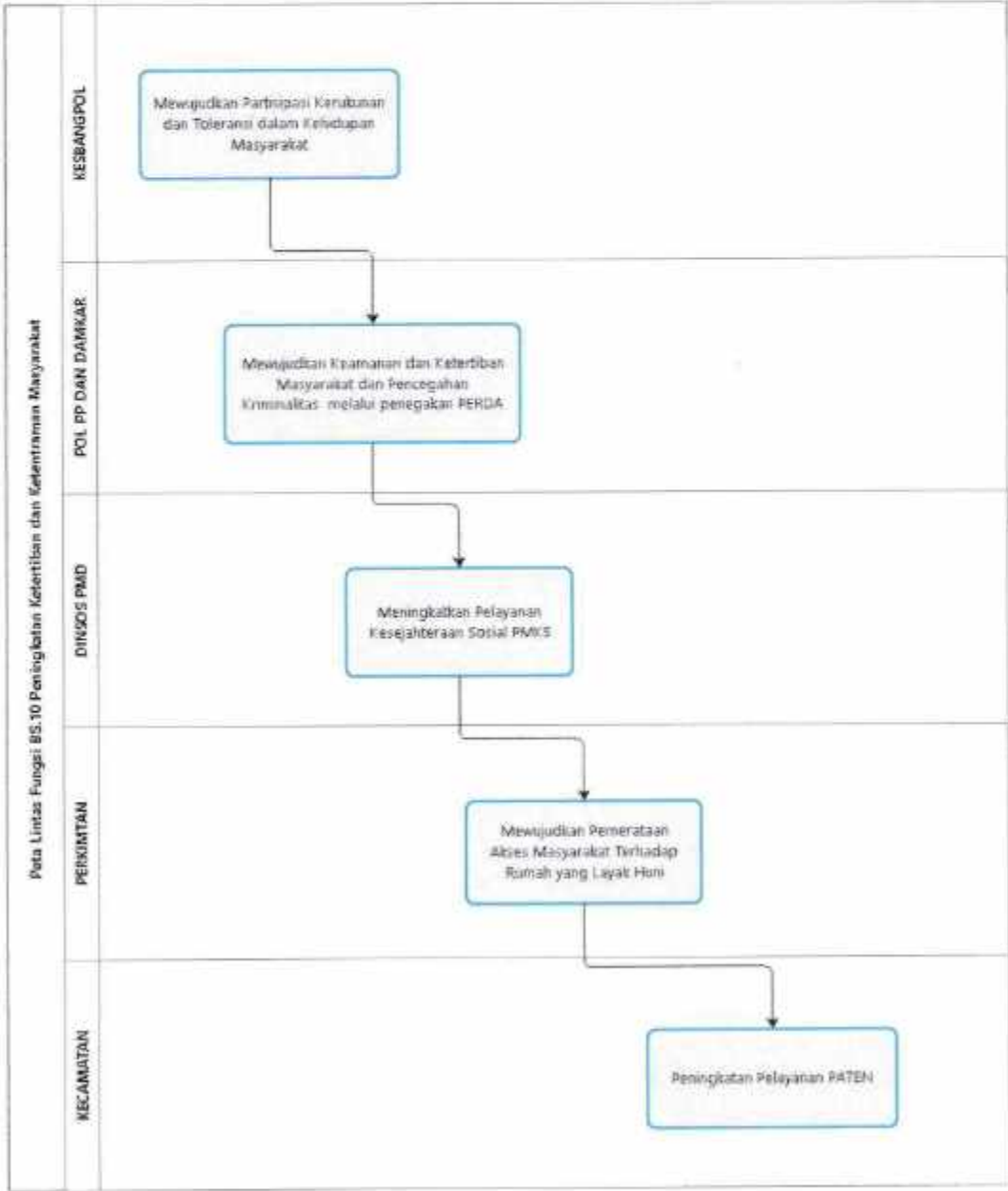
BS.10.05 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

BS.10.05 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<div><p>BS.10.05.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p></div>
---	--










BS.10.06 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

<p>BS.10.06 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<div>  <p>BS.10.06.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> </div>
---	--

Peta Lintas Fungsi BS.10




BS.11 Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

BS.11 Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi					
	BS.11.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BS.11.02 Pengembangan Permukiman	BS.11.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	BS.11.04 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	BS.11.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
					
	BS.11.06 Pengembangan Perumahan	BS.11.07 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BS.11.08 Kawasan Permukiman	BS.11.09 Peningkatan Riset, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

BS.11.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

BS.11.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	 <p>BS.11.01.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p>
---	---



BS.11.02 Pengembangan Permukiman

BS.11.02 Pengembangan Permukiman	 <p>BS.11.02.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>
----------------------------------	--

BS.11.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

BS.11.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<div></div> <div>BS.11.03.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</div>
---	--

BS.11.04 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

BS.11.04 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<div></div> <div>BS.11.04.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</div>	<div></div> <div>BS.11.04.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</div>
--	--	---

BS.11.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

<p>BS.11.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p>	<div data-bbox="829 362 1039 488"> </div> <p data-bbox="764 506 1105 640">BS.11.05.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--

BS.11.06 Pengembangan Perumahan

<p>BS.11.06 Pengembangan Perumahan</p>	<div data-bbox="578 1010 719 1111"> </div> <p data-bbox="526 1123 773 1209">BS.11.06.01 Pendirian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <div data-bbox="870 1010 1011 1111"> </div> <p data-bbox="829 1123 1052 1227">BS.11.06.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <div data-bbox="1162 1010 1304 1111"> </div> <p data-bbox="1118 1123 1349 1202">BS.11.06.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <div data-bbox="721 1262 862 1363"> </div> <p data-bbox="695 1375 888 1436">BS.11.06.04 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <div data-bbox="1024 1262 1166 1363"> </div> <p data-bbox="980 1375 1211 1433">BS.11.06.05 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)</p>
--	---


BS.11.07 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

<p>BS.11.07 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p>	<div data-bbox="805 1844 976 1968"> </div> <p data-bbox="740 1980 1040 2081">BS.11.07.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	---

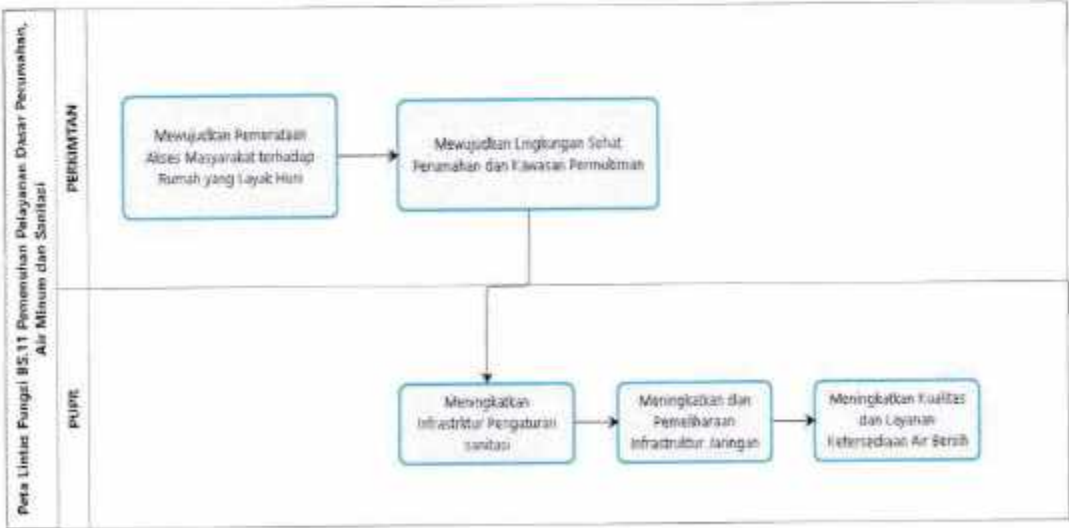
BS.11.08 Kawasan Permukiman

BS.11.08 Kawasan Permukiman	 <p>BS.11.08.01 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p>
-----------------------------	--

BS.11.09 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

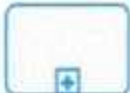




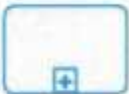

BS.11.09 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	 <p>BS.11.09.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p>
--	--

Peta Lintas Fungsi BS.11

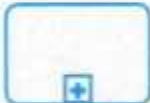



BS.12 Peningkatan Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana,



Pandemi dan Ketahanan Pangan

BS.12PeningkatanKapasitasAnalisisdanPenangananTerkaitPandemi Pandemi dan Ketahanan Pangan				
	BS.12.01 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	BS.12.02 Penanganan Kerawanan Pangan	BS.12.03 Pengawasan Keamanan Pangan	BS.12.04 Penanganan Bencana
				
	BS.12.05 Penanggulangan Bencana	BS.12.06 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BS.12.07 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	


BS.12.01 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

BS.12.01 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
	BS.12.01.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan	BS.12.01.02 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dgn Angka kecukupan Gizi

BS.12.02 Penanganan Kerawanan Pangan

BS.12.02 Penanganan Kerawanan Pangan		
	BS.12.02.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	BS.12.02.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota




BS.12.03 Pengawasan Keamanan Pangan

BS. 12.03 Pengawasan Keamanan Pangan	<div><p>BS.12.03.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p></div>
--------------------------------------	--

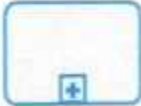

BS.12.04 Penanganan Bencana

BS. 12.04 Penanganan Bencana	<div><p>BS.12.04.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p></div>
------------------------------	---

BS.12.05 Penanggulangan Bencana

BS. 12.05 Penanggulangan Bencana	<div><div><p>BS.12.05.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana</p></div><div><p>BS.12.05.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p></div><div><p>BS.12.05.03 Pelayanan Penyelamatan dan Bakti Korban Bencana</p></div></div>
----------------------------------	--

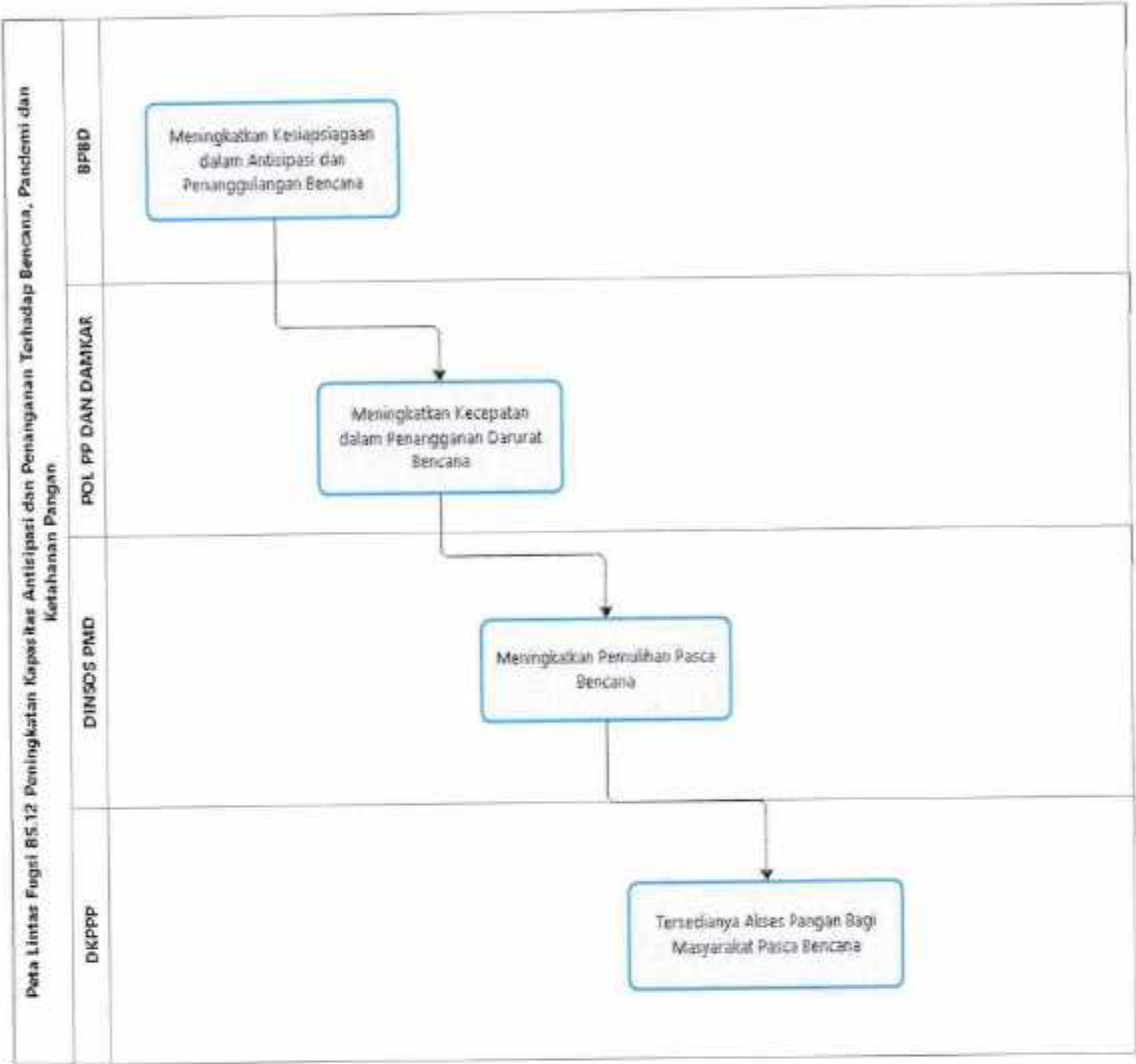
BS.12.06 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

BS. 12.06 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	BS.12.06.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	BS.12.06.02 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

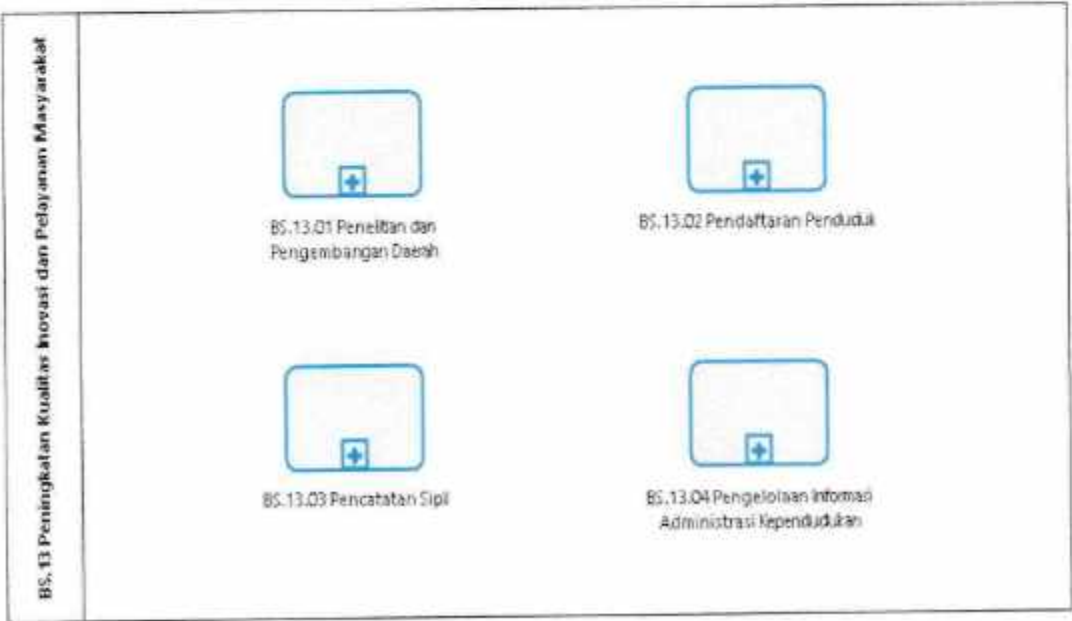
BS.12.07 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

BS. 12.07 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	BS.12.07.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BS.12.07.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	BS.12.07.03 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Peta Lintas Fungsi BS.12



BS.13 Peningkatan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat



BS.13.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah

<p>BS.13.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<div data-bbox="850 430 1021 544" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="813 556 1057 607">BS.13.01.01 Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p>
--	---

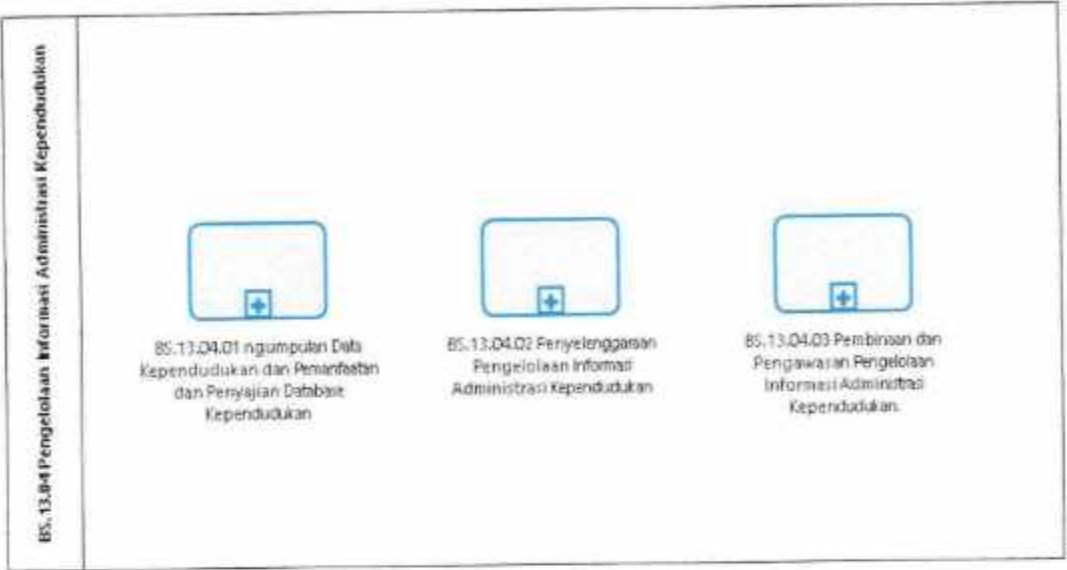
BS.13.02 Pendaftaran Penduduk

<p>BS.13.02 Pendaftaran Penduduk</p>	<div data-bbox="615 1068 756 1181" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="602 1194 769 1244">BS.13.02.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <div data-bbox="1070 1068 1211 1181" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1016 1194 1265 1244">BS.13.02.02 Penataan Pendaftaran Penduduk</p> <div data-bbox="615 1310 756 1423" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="581 1436 794 1486">BS.13.02.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p> <div data-bbox="1070 1310 1211 1423" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1034 1436 1252 1509">BS.13.02.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p>
--------------------------------------	---

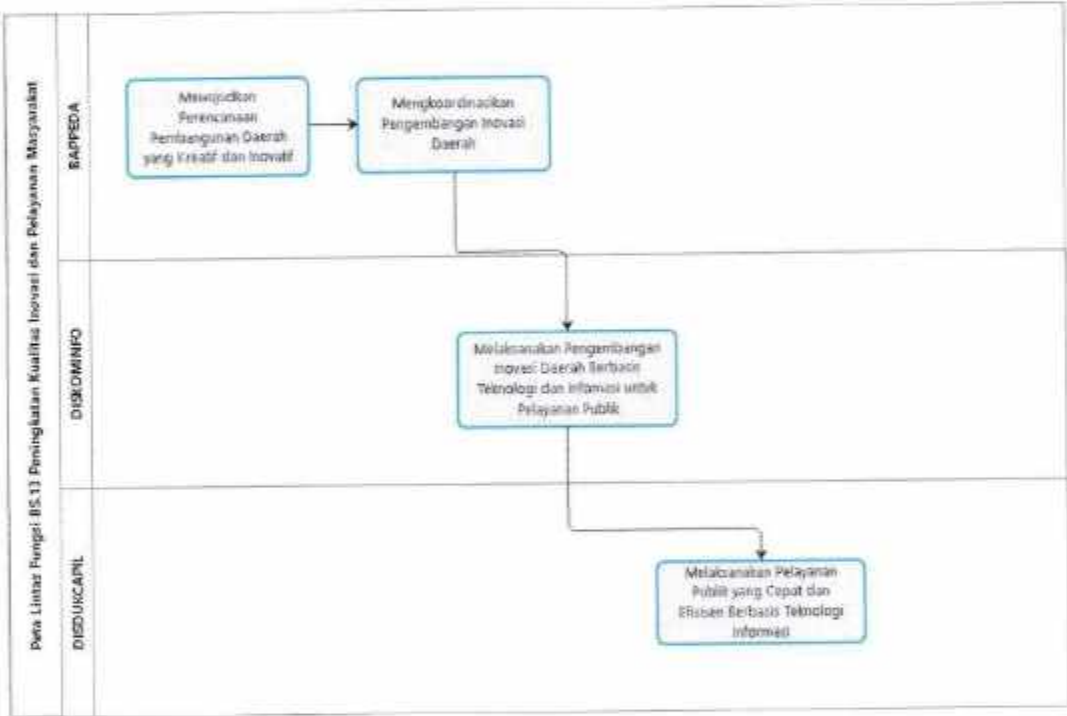
BS.13.03 Pencatatan Sipil

<p>BS.13.03 Pencatatan Sipil</p>	<div data-bbox="579 1859 721 1973" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="527 1985 773 2036">BS.13.03.01 Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <div data-bbox="870 1859 1011 1973" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="834 1985 1047 2036">BS.13.03.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p> <div data-bbox="1159 1859 1300 1973" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1118 1985 1341 2058">BS.13.03.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p>
----------------------------------	--







BS.13.04 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Peta Lintas Fungsi BS.13





BS.14Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BS.14 Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			BS.14.01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			BS.14.02 Perlindungan Perempuan
			BS.14.03 Peningkatan Kualitas Keluarga
			BS.14.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
			BS.14.05 Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			BS.14.06 Perlindungan Khusus Anak

BS.14.01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

BS.14.01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	BS.14.01 Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

BS.14.02 Perlindungan Perempuan

BS.14.02 Perlindungan Perempuan		
	BS.14.02.01 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	
		BS.14.02.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BS.14.03 Peningkatan Kualitas Keluarga

<p>BS.14.03 Peningkatan Kualitas Keluarga</p>	<div data-bbox="678 405 816 514"></div> <div data-bbox="630 529 865 630"> <p>BS.14.03.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat kabupaten/kota</p> </div> <div data-bbox="1008 405 1146 514"></div> <div data-bbox="956 529 1203 650"> <p>BS.14.03.02 Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</p> </div>
---	--

BS.14.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

<p>BS.14.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p>	<div data-bbox="802 1113 995 1222"></div> <div data-bbox="725 1239 1071 1363"> <p>BS.14.04.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> </div>
---	--

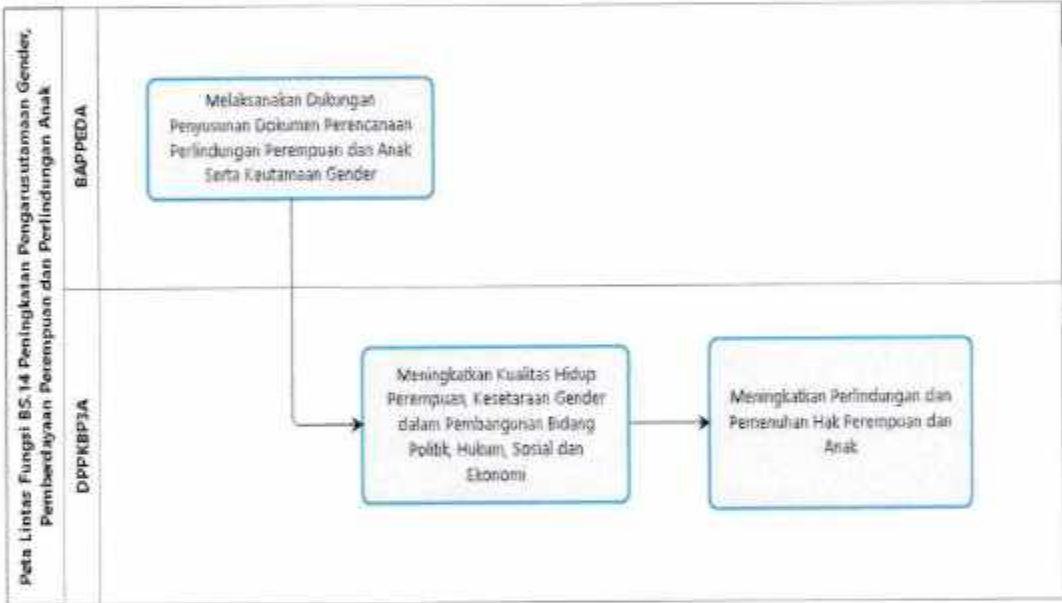
BS.14.05 Pemenuhan Hak Anak (PHA)

<p>BS.14.05 Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p>	<div data-bbox="638 1824 831 1953"></div> <div data-bbox="561 1973 907 2089"> <p>BS.14.05.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> </div> <div data-bbox="1019 1824 1213 1953"></div> <div data-bbox="946 1973 1287 2111"> <p>BS.14.05.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> </div>
--	--




BS.14.06 Perlindungan Khusus Anak

BS.14.06 Perlindungan Khusus Anak	 <p>BS.14.06.01 Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota</p>
-----------------------------------	--




Peta Lintas Fungsi BS.14



BS.15 Peningkatan Pemajuan Pembangunan Kebudayaan

BS.15 Peningkatan Pemajuan Pembangunan Kebudayaan	<div>    </div> <div> BS.15.01 Pengembangan Kebudayaan BS.15.02 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya BS.15.03 Pengelolaan Permuseuman </div>
---	--


BS.15.01 Pengembangan Kebudayaan

BS. 15.01 Pengembangan Kebudayaan	<div><div><p>BS.15.01.01 pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota</p></div><div><p>BS.15.01.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota</p></div><div><p>BS.15.01.03 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p></div></div>
-----------------------------------	---

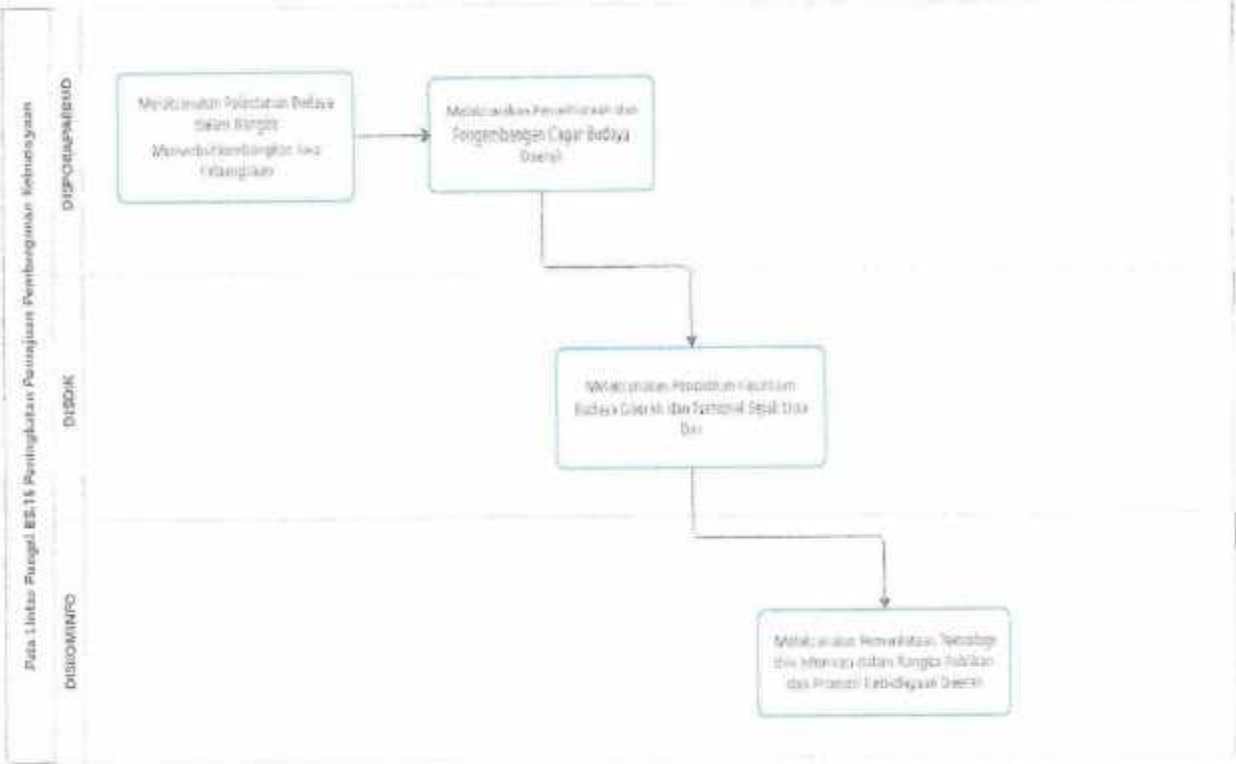
BS.15.02 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

BS. 15.02 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<div><div><p>BS.15.02.01 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</p></div></div>
--	---

BS.15.03 Pengelolaan Permuseuman

BS. 15.03 Pengelolaan Permuseuman	<div><div><p>BS.15.03.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</p></div></div>
-----------------------------------	--

Peta Lintas Fungsi BS.15



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA